

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul dan bagaimana representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dokumentasi dan wawancara subjek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai GERINDRA, dan PAN di mana empat partai inilah yang masing-masing dari partai tersebut memiliki satu calon legislatif perempuan terpilih. Dari empat partai tersebut, yang dipilih menjadi narasumber tidak hanya calon legislatif perempuan terpilih saja tetapi juga calon legislatif perempuan tidak terpilih beserta pengurus partai politik.

Caleg perempuan terpilih adalah Arni Tyas Palupi, ST (Partai Golkar), Suratun, SH (PAN), Novi Sarhati (Partai Gerindra) dan Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH (PDIP). Sedangkan untuk caleg perempuan ada Ekawati Hestningsih (Partai Golkar), Dra. Sri Wardani (Partai Gerindra), Sri Lestari (PDIP), dan Sri Lestari (PAN). Ketua Partai Golkar yaitu Paidi, S. IP; Ketua Partai PDIP yaitu Joko Purnomo; Sekjen PAN yaitu Dampak Aktivis; dan Sekretaris DPC Gerindra yaitu Darwinto. Berikut adalah penjelasannya:

3.1 Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

3.1.1 Keterwakilan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu

Keberadaan perempuan saat ini sudah sangat diperhatikan di dalam segala aspek dan salah satunya adalah di dalam politik. Di dalam politik sendiri, semakin banyak perempuan yang bersaing untuk mendapatkan jabatan di parlemen. Hal ini dikarenakan, aturan terkait dengan keterwakilan perempuan melalui kuota sebanyak 30% di dalam partai politik.

Peraturan ini tertuang dalam “Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Pasal 65 ayat 1 bahwa setiap partai politik yang mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” dan peraturan ini juga tertera di dalam “Peraturan KPU No. 2 tahun 2018 Pasal 6 bahwa daftar calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil”. Total keseluruhan Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Bantul sebanyak 204 orang dalam Pemilu 2019, baik itu total untuk keseluruhan dapil maupun partai politik. Berikut tabelnya:

Tabel 3. 1

Daerah Pemilihan Kabupaten Bantul dan Jumlah Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No.	Daerah Pemilihan	Wilayah	Jumlah Caleg Perempuan		Jumlah Caleg Laki-laki		Jumlah
			Σ	%	Σ	%	
1	Bantul 1	Bantul	35	44,30	44	55,70	79
		Sewon					

2	Bantul 2	Banguntapan	36	47,37	40	52,63	76
		Piyungan					
3	Bantul 3	Dlingo	31	48,44	33	51,56	64
		Imogiri					
		Pleret					
4	Bantul 4	Bambanglipuro	41	47,13	46	52,87	87
		Jetis					
		Kretek					
		Pundong					
5	Bantul 5	Sanden Pandak	31	45,59	37	54,41	68
		Pajangan					
		Srandakan					
6	Bantul 6	Kasihani	30	46,15	35	53,85	65
		Sedayu					
TOTAL			204	46,47	235	53,53	439

Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Republik Indonesia

Dari tabel di atas dapat kita lihat juga bahwa dari masing-masing Daerah Pemilihan telah memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30% sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Tabel 3. 2

Perbandingan Jumlah dan Persentase Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No.	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	Partai Amanah Nasional (PAN)	15	44,12%	19	55,88%	34
2	Partai Berkarya	10	50%	10	50%	20
3	Partai Bulan Bintang (PBB)	11	55%	9	45%	20
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	21	46,67%	24	53,33%	45
5	Partai Demokrat	22	52,38%	20	47,62%	42
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	19	43,18%	25	56,82%	44
7	Partai Gerakan Perubahan	5	50%	5	50%	10

	Indonesia (Garuda)					
8	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	20	45,45%	24	54,55%	44
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	5	50%	5	50%	10
10	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	19	42,22%	26	57,78%	45
11	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	15	42,86%	20	57,14%	35
12	Partai NASDEM	18	45%	22	55%	40
13	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9	42,86%	12	57,14%	21
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	6	50%	6	50%	12
15	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	8	53,33%	7	46,67%	15
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1	50%	1	50%	2
Total		204	46,47%	235	53,53%	439

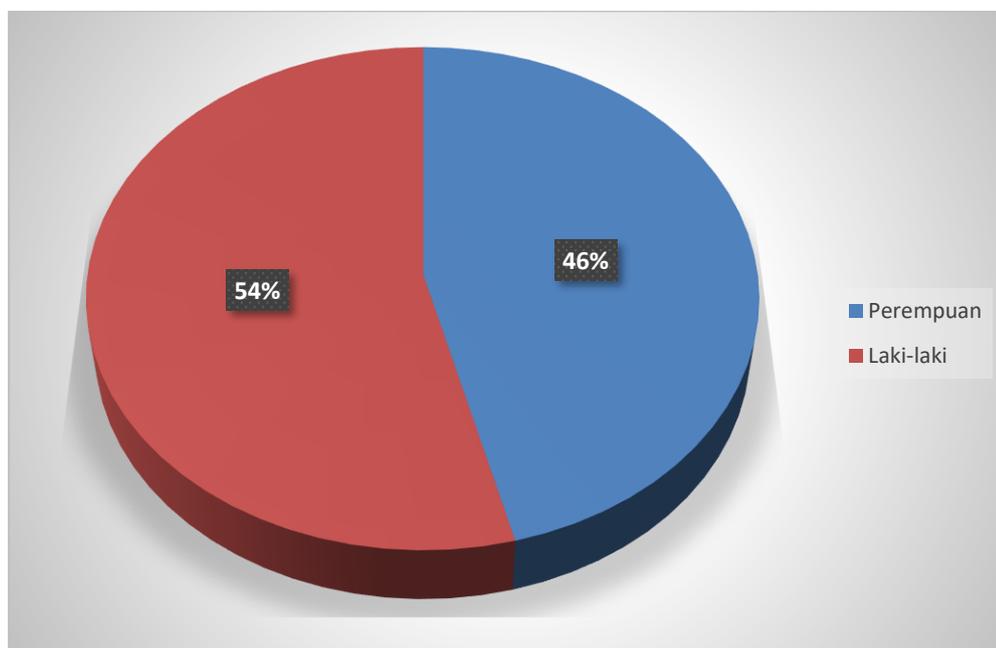
Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas masing-masing partai politik telah memenuhi kuota sebanyak 30% bahkan lebih. Kemudian dari total data tersebut akan disajikan dalam bentuk diagram seperti di bawah ini:

Gambar 3. 1

Diagram Perbandingan Jumlah dan Persentase Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul



Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Republik Indonesia

Apabila dilakukan perbandingan data caleg perempuan keseluruhan antara tahun 2014 dan 2019 akan terlihat seperti berikut ini:

Tabel 3. 3

Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan Keseluruhan Dalam Pemilu Tahun 2014 dan 2019

No.	Partai Politik	2014		2019	
		Σ	%	Σ	%
1	PAN	20	44%	15	44%
2	PARTAI BERKARYA	0	0	10	50%
3	PBB	17	52%	11	55%
4	PDIP	17	40%	21	47%

5	DEMOKRAT	27	60%	22	52%
6	GERINDRA	18	40%	19	43%
7	GARUDA	0	0	5	50%
8	GOLKAR	19	42%	20	45%
9	HANURA	9	39%	5	50%
10	PKS	18	40%	19	42%
11	PKB	20	45%	15	43%
12	PARTAI NASDEM	19	42%	18	45%
13	PPP	16	39%	9	43%
14	PSI	0	0	6	50%
15	PERINDO	0	0	8	53%
16	PKPI	6	46%	1	50%
JUMLAH		206	44%	204	46%

Sumber: Diolah Dari <https://bit.ly/2Xuurll>

Dari tabel di atas tampak jelas bahwa Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) baru ada di dalam pemilu 2019. Hal ini dikarenakan partai politik tersebut baru diverifikasi faktual oleh KPU Bantul terkait dengan pengecekan data pengurus, keterwakilan perempuan dan pengecekan alamat bangunan kantor parpol dilansir dari jogja.tribunnews.com. Persentase caleg perempuan keseluruhan di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebesar 2% dari pemilu di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 44% menjadi 46% pada pemilu 2019.

Artinya dengan adanya undang-undang terkait kuota 30% untuk memuat keterwakilan perempuan membawa pengaruh bagi perempuan untuk maju ke dalam pemilu dan semakin terlihat jelas bagaimana gerakan yang dilakukan oleh perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bantul

sendiri, dengan banyaknya calon legislatif perempuan yang maju dalam pemilu untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul.

Terutama dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Gerinda dan PAN. Karena narasumber di dalam penelitian ini berasal dari keempat partai politik tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pengurus partai politiknya. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Sekjen PAN Bapak Damba Aktivis yakni:

“Kalau untuk caleg perempuan itu mulai tahun 2009, 2014, 2019 calegnya bertambah, karena kita punya aturan disesuaikan dengan aturan KPU bahwa ada 30% kuota perempuan, di setiap dapil itu kitaenuhi semua, jadi kalau meningkat juga tidak menurun juga tidak karena stabil” (wawancara dilakukan di Ruang Fraksi PAN Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

Begitu juga dengan Sekretaris Partai Gerinda Bapak Darwin, beliau mengatakan:

“Peningkatan, dulu itu cuma sekitar 30% saja, sekarang lebih dari 30% kemarin 40% kayaknya kita Gerinda perempuan, karena kita mencoba membuka peluang peran perempuan karena perempuan kalau kita lihat lebih banyak dari pada laki-laki, kita beri kesempatan” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

Ketua Partai lainnya juga mengatakan hal yang sama:

“Kalau peminatnya banyak ada peningkatan.....kalau peningkatan dari segi jumlahnya caleg perempuannya banyak” (Wawancara dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bantul Bapak Paidi, S. IP, di Ruang Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

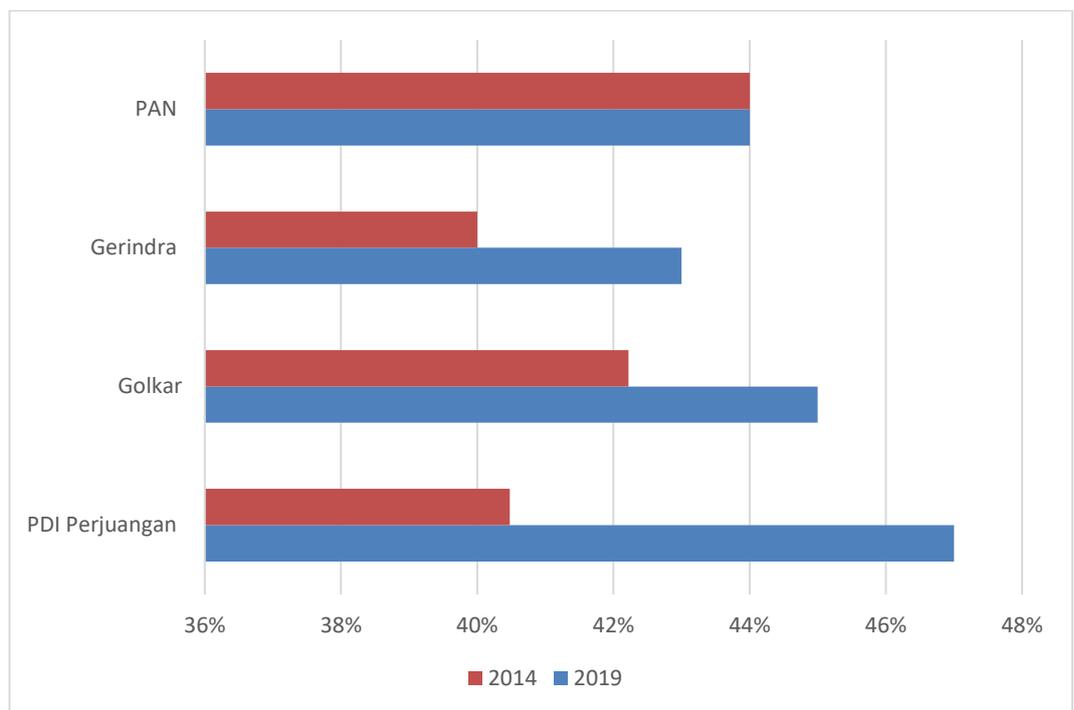
“.....jumlah caleg perempuan ada 20 orang, artinya kita memang memenuhi ketentuan undang-undang 30% setiap daerah pemilihan” (Wawancara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul Bapak

Joko Purnomo, di Kantor DPC PDIP Kabupaten Bantul, 8 November 2019).

Pernyataan dari hasil wawancara tersebut diperkuat dengan grafik perbandingan seperti di bawah ini:

Gambar 3. 2

Grafik Perbandingan Jumlah dan Persentase Partai Politik Sebagai Subjek Penelitian Tahun 2014 dan 2019



Sumber: Diolah Dari <https://bit.ly/2Xuurl1>

Berdasarkan perbandingan jumlah dan persentase di atas, terdapat tiga partai yang mengalami peningkatan yaitu partai PDIP dari 40% menjadi 47%, Partai Golkar dari 42% menjadi 45%, dan Partai Gerindra dari 40% menjadi 43%. Sedangkan PAN yang secara jumlah menurun tetapi berdasarkan persentasenya cenderung stabil yaitu di angka 44%. Dengan kata lain, dari

keempat partai ini masing-masingnya telah memuat keterwakilan perempuan sesuai dengan aturan 30% bahkan lebih.

3.1.2 Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mengeluarkan SK-KPU No. 269 Tentang Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan menetapkan bahwa ada 45 daftar calon legislatif terpilih untuk duduk di DPRD Kabupaten Bantul. Berikut persentase calon legislatif terpilih di Kabupaten Bantul:

Tabel 3. 4

Persentase Jumlah Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Terpilih Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No.	Partai Politik	Perempuan		Laki-laki		Jumlah
		Σ	%	Σ	%	
1	PKB	0	0	6	100	6
2	PARTAI GERINDRA	1	12,5	7	87,5	8
3	PDIP	1	9,1	10	90,9	11
4	PARTAI GOLKAR	1	20	4	80	5
5	PKS	0	0	4	100	4
6	PAN	1	20	4	80	5
7	PARTAI DEMOKRAT	0	0	2	100	2
8	PBB	0	0	1	100	1
9	PPP	0	0	2	100	2
10	PARTAI NASDEM	0	0	1	100	1
TOTAL		4	8,9	41	91,1	45

Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul

Dari 45 kursi yang tersedia hanya 4 yang terisi oleh caleg perempuan terpilih dan 41 kursi lainnya terisi oleh caleg laki-laki terpilih dan apabila dilihat dalam bentuk diagram akan terlihat seperti di bawah ini:

Gambar 3. 3

Diagram Persentase Calon Legislatif Perempuan dan Laki-laki Terpilih Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul



Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul

Di bawah ini adalah tabel yang membandingkan jumlah caleg perempuan terpilih antara periode 2014 dengan 2019 di mana jumlah dan persentasenya mengalami peningkatan, berikut tabelnya:

Tabel 3. 5

Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan Terpilih Dalam Pemilu Tahun 2014 dan 2019

No.	Partai Politik	2014		2019	
		Σ	%	Σ	%
1	PAN	1	16,66%	1	20
2	BERKARYA	0	0	0	0
3	PBB	0	0	0	0
4	PDIP	0	0	1	9,1

5	DEMOKRAT	0	0	0	0
6	GERINDRA	0	0	1	12,5
7	GARUDA	0	0	0	0
8	GOLKAR	1	20%	1	20
9	HANURA	0	0	0	0
10	PKS	0	0	0	0
11	PKB	1	25%	0	0
12	NASDEM	0	0	0	0
13	PPP	0	0	0	0
14	PSI	0	0	0	0
15	PERINDO	0	0	0	0
16	PKPI	0	0	0	0
JUMLAH		3	6,60%	4	8,9

**Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bantul**

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa keterpilihan perempuan dalam legislatif tidak mencapai 30% baik pada pemilu tahun 2014 maupun 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan keterwakilan perempuan pada saat pencalegkan yang sampai pada persentase 30% bahkan lebih. Tetapi dalam pemilu 2019 mengalami peningkatan jumlah dan persentase calon legislatif perempuan terpilih yaitu 4 orang calon legislatif perempuan terpilih atau setara dengan 8,9%, persentase tersebut meningkat 2,3%. Dari 4 caleg perempuan ada dua caleg perempuan petahana yakni Suratun, SH (PAN) dan Arni Tyas Palupi, ST (GOLKAR) dan dua caleg perempuan pendatang baru yakni Novi Sarhati (GERINDRA) dan Nur Yuni Astuti (PDIP). Sedangkan pada pemilu 2014 jumlah calon legislatif perempuan hanya berjumlah 3 orang atau setara dengan 6,6% yakni Suratun, SH (PAN), Arni Tyas Palupi, ST (GOLKAR) dan Nur Laili Maharani (PKB). Peningkatan

sebanyak 2,3% ini, dapat dikatakan sebagai peningkatan yang lumayan atau cukup bagus karena sudah ada perwakilan perempuan yang bisa duduk di parlemen.

3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

3.2.1 Faktor Pendukung

a. Dukungan Partai Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyatnya yaitu dengan menyelenggarakan pemilu. Di mana di dalam pemilu diikuti oleh peserta pemilu yaitu partai politik. Dalam keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilu tentu tidak lepas dari dukungan partai politik yang mana ini adalah sebagai salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi keterpilihan perempuan. Mengingat bahwa calon legislatif berasal dari partai politik.

Dukungan partai politik yaitu sebagai mesin demokrasi, partai politik tidak melakukan diskriminasi dalam merekrut anggota-anggotanya secara gender dan juga mencalonkan kandidat perempuan dengan jumlah yang signifikan. Artinya partai politik baik itu dalam kepengurusan partai sampai dengan pencalonan dalam pemilu harus mengikutsertakan perempuan dan juga memberikan dukungan kepada caleg pasca pemilu. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU yang harus memuat keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Kandidat atau calon yang akan maju ke DPRD tentu tidak lepas dari dukungan partai politik. Karena calon yang maju atau yang akan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum haruslah berasal dari partai politik tidak bisa independen. Apabila tidak mendapatkan dukungan dari partai politik secara otomatis calon anggota legislatif tidak dapat mencalonkan dirinya.

Dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul tentu setiap calon legislatifnya mendapatkan dukungan dari partai politik. Wawancara dengan Joko Purnomo sebagai Ketua DPC PDIP di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul, 8 November 2019, bentuk dukungan yang di berikan.:

“Kami di PDIP Perjuangan ini kan punya wadah namanya Persatuan Perempuan Merah Putih itu memang komunitas perempuan PDI Perjuangan yang diwadahi dengan nama itu, nah kemudian mereka membagi tugas untuk mensupport kader perempuan kita yang maju di tiap dapil, itu disupport oleh komunitas itu dengan membawa beberapa program-program yang diberikan kepada masyarakat seperti itu”.

Begitu pun disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar, Bapak Paidi, S. IP yaitu membantu semua caleg baik perempuan maupun laki-laki dengan memberikan alat-alat kampanye bendera, kartu nama, dan kaos atau atribut yang berhubungan dengan partai (Wawancara di Ruang Fraksi GOLKAR Kabupaten Bantul, 1 November 2019). Diperkuat dengan hasil wawancara caleg perempuan terpilih dan tidak terpilih mengemukakan bahwa dukungan dari partai politik merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu di Kabupaten

Bantul. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Arni Tyas Palupi caleg petahana perempuan terpilih dari Partai Golkar, beliau mengemukakan bahwa:

“Partai sangat mendukung dan mensupport 44 caleg yang maju dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif ke masyarakat selagi mempunyai potensi, basis masa yang banyak silakan mendaftar atau maju menjadi calon di pemilu” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi GOLKAR Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

Selanjutnya Ibu Suratun, SH caleg petahana perempuan dari PAN mengemukakan bahwa “partai politik mendukung untuk ikut mensosialisasikan di masyarakat” (Wawancara di Ruang Fraksi GOLKAR Kabupaten Bantul, 1 November 2019). Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Novi Sarhati, caleg perempuan terpilih pendatang baru dari Partai Gerindra, pada saat melakukan wawancara, beliau mengatakan:

“Bentuk dukungan yang diberikan partai politik Gerindra kepada caleg perempuannya yaitu dengan mendorong semua caleg perempuan untuk bisa maju dan memotivasi semua caleg perempuannya agar maju menjadi anggota dewan” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi GERINDRA Kabupaten Bantul, 31 Oktober 2019).

Tetapi ada pernyataan berbeda dari caleg perempuan tidak terpilih Partai Gerindra Ibu Sri Wardani (pendatang baru) yaitu:

“Partai secara keorganisasian dari diawal sih pemenuhan kuota kan memang iya begitu, itu kan secara administratif itu, kalau keterkaitan dengan misalnya di kampanye segala macam sih saya merasa memang kurang sekali gitu karena kami cenderung jalan sendiri karena seperti tadi ada pengurus yang memang merangkap Caleg jadi kan fokusnya terpecahkan Mbak” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 4 November 2019).

Artinya dukungan yang diberikan oleh partai politik sudah bagus, sama rata kepada semua kader perempuan yang maju

menjadi caleg, walaupun pengurus dari partai juga maju menjadi caleg, dengan kata lain suportif dalam berkompetisi. Jadi, di satu sisi memang sama-sama dari internal partai dan di satu sisi sama-sama bersaing dan menjadi kompetitor dalam pileg. Perlu diingat juga bahwa namanya juga dalam berkompetisi semua orang mempunyai hak untuk mencalonkan dan mendukung dirinya sendiri menjadi calon termasuk pengurus partai. Hanya saja efek yang muncul apabila seorang pengurus partai maju ke dalam pencalegkan akan menjadi berbeda, karena power mereka yang miliki, sudah berada di kepengurusan partai lebih lama dan mempunyai modal awal yaitu basis massa yang banyak. Sehingga ini malah menjadi penghambat bagi caleg perempuan terlebih lagi pendatang baru.

Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH caleg perempuan terpilih pendatang baru PDI Perjuangan Kabupaten Bantul, juga mengatakan dukungan dari partai politik juga dapat mempengaruhi keterpilihan perempuan. Bentuk dukungannya:

“Memberikan tempat dan kesempatan untuk maju menjadi caleg.....karena di dalam undang-undang diharuskan keterwakilan perempuan dalam pileg harus 30% dan tanpa kesempatan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa”(27 November 2019).

Setelah hasil pemilu keluar dan ternyata hanya ada satu caleg perempuan yang terpilih untuk duduk di perlemen, partai politik pun juga masih memberikan dukungan kepada caleg perempuan tidak terpilih, yang di perkuat oleh hasil wawancara

dengan Ibu Ekawati Hestningsih (pendatang baru) dari Partai Golkar beliau mengatakan bahwa “Dukungannya sangat baik ya, kita pasca pemilu saja masih dirangkul, setiap kegiatan masih di undang, kalau ada *event* masih dilibatkan juga” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 2 November 2019). Hal senada juga disampaikan oleh caleg perempuan tidak terpilih pendatang baru dari PDI Perjuangan Ibu Sri Lestari:

“Dukungan dari partai politik masih ada, tetapi kadang malah justru calegnya sendiri toh Mbak yang merasa tidak percaya diri atau merasa gimana, sebenarnya kalau dari partai politik sendiri masih di wonge” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 25 November 2019).

Hal yang sama juga disampaikan oleh caleg perempuan tidak terpilih lainnya: Masih diundang mengikuti kegiatan yang ada di partai (wawancara dengan Ibu Padmini caleg perempuan tidak terpilih pendatang baru dari PAN, dilakukan di kediaman beliau, 20 November 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan caleg perempuan tidak terpilih dari PAN Ibu Padmini, dukungan yang di berikan juga masih dilibatkan dalam kegiatan kepartaian, mengingat Ibu Padmini di PAN sendiri menjabat sebagai Bendahara DPD Bantul. Agenda yang selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh PAN sendiri dalam waktu dekat ini yaitu rapat persiapan untuk pergantian kepengurusan yang baru untuk periode 2019-2024.

Artinya dengan dibuatkannya peraturan yang harus memuat keterwakilan perempuan 30%, secara tidak langsung peraturan

tersebut membuat partai politik memberikan dukungan dan motivasi lebih kepada caleg perempuan untuk maju dan mengingat narasumber yang diwawancarai berasal dari partai politik yang dapat dikatakan partai besar, dengan basis masa yang besar pula sehingga dapat membuka peluang keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu di Kabupaten Bantul. Bentuk dukungan yang diberikan oleh partai politik seperti memberikan motivasi, dukungan dan juga meletakkan caleg perempuan pada nomor urut yang besar. Seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6

Nomor Urut Caleg Perempuan

No	Partai Politik	Dapil	Nama Calon Legislatif Perempuan	Nomor Urut
1	GOLKAR	Bantul 1	Arni Tyas Palupi, ST	1
2	GOLKAR	Bantul 4	Ekawati Hestningsih	5
3	PDIP	Bantul 2	Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH	3
4	PDIP	Bantul 6	Sri Lestari	5
5	PAN	Bantul 3	Suratun, SH	1
6	PAN	Bantul 1	Padmini Karyanti	2
7	GERINDRA	Bantul 2	Novi Sarhati	4
8	GERINDRA	Bantul 2	Dra. Sri Wardani	3

Sumber: Diolah Dari Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul

Dari tabel di atas partai politik telah menempatkan salah satu atau bahkan dua caleg perempuan yang ditempatkan pada nomor urut yang besar pada pemilu legislatif. Dengan begitu penempatan caleg perempuan pada nomor urut besar juga membuka peluang bagi caleg perempuan untuk terpilih, ini dikarenakan kecenderungan pemilih untuk memilih nomor urut paling atas atau awal apabila tidak tahu pasti siapa caleg yang akan dipilih dan makin tinggi nomor urut semakin tinggi dukungan partai terhadap caleg tersebut. Hal ini kadang berkaitan dengan pertama, posisi caleg sebagai pengurus seperti: Arni Tyas Palupi, ST, posisi beliau di dalam kepengurusan partai sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bantul; Suratun, SH, posisi beliau di dalam partai adalah Wakil Ketua DPD PAN Bantul; Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH, beliau di dalam kepengurusan DPC PDIP Kabupaten Bantul sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak; Novi Sarhati sebagai Wakil Bendahara DPC Partai Gerindra; Ekawati Hestningsih sebagai pengurus di anak cabang Partai Golkar (Al-Hidayah); Padmini Karyanti posisinya sebagai Bendahara DPD PAN Kabupaten Bantul; Sri Lestari mengikuti sayap partai (Sarinah); dan Dra. Sri Wardani posisinya sebagai Koordinator Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi (PIRA) Perempuan Indonesia Raya Gerindra di tingkat provinsi.

Kedua, proses rekrutmen. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar, Gerindra, PAN, dan PDIP adalah dengan mendahulukan kader dari internal partai (baik pengurus ataupun tidak) terutama kader perempuannya dan melihat kontribusi apa yang telah diberikan oleh keseluruhan caleg termasuk caleg perempuan kepada partai dan apabila di rasa masih belum sampai kepada kuota 30% baru akan dilakukan rekrutmen dari eksternal partai. Setelah hasil keluar pun partai politik juga masih mendukung caleg perempuan yang tidak terpilih dengan mengikutsertakan ke dalam agenda atau event yang diadakan oleh Partai Politik.

Persaingan atau kompetisi yang terjadi antar dapil di Kabupaten Bantul sangat berat ketika praktik *money politic* dilakukan. Ini diperkuat dengan hasil wawancara baik itu caleg perempuan terpilih maupun tidak terpilih, seperti hasil wawancara dengan Ibu Arni Tyas Palupi, ST caleg petahana perempuan terpilih Partai Golkar pada tanggal 1 November 2019 mengatakan bahwa di dapil mana pun ada hujan uang. Ini diperkuat dengan pendapat caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari Partai Golkar juga Ibu Ekawati “money politic masih tetap berjalan mbak”.

Hal senada juga dikatakan oleh caleg perempuan tidak terpilih lainnya seperti: Ibu Padmini (PAN) mengatakan bahwa

persaingan di dalam pemilu masih ada yang menggunakan uang; Ibu Dra. Sri Wardani (Gerindra) mengatakan bahwa ada amplop yang bertebaran di serangan fajar; dan Ibu Sri Lestari (PDIP) mengatakan bahwa di masyarakat sendiri juga maunya program dapat materi juga dapat (materialistisnya) masih ke pakai.

Artinya caleg sendiri melakukan praktik *money politic* agar mendapatkan suara yang banyak dan sasarannya adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan masyarakatnya sendiri menjadikan *money politic* sebagai suatu budaya atau keharusan yang terjadi pada saat musim pemilu tiba untuk mendapatkan uang dengan kata lain untuk memenuhi kebutuhan primernya. Hal ini juga disebabkan oleh lemahnya regulasi atau peraturan hanya sebatas hitam di atas putih terkait dengan hukuman pidana bagi yang memberi dan menerima uang politik tersebut dan kurangnya sosialisasi di masyarakat tentang konsekuensi yang didapat apabila mereka ikut tersangkut dalam masalah *money politic*.

b. Motivasi Kader

Dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Keempat partai ini mengalami peningkatan dari segi persentase caleg perempuan yang maju bahkan ada juga yang persentasenya stabil seperti partai PAN. Walaupun persentase dari partai PAN dikatakan stabil tetapi tetap

saja ini tidak mengurangi kuota yang sudah ditetapkan dari Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan caleg petahana perempuan terpilih yaitu Arni Tyas Palupi, ST (Partai Golkar), beliau mengatakan bahwa:

“.....sudah ada ketertarikan untuk terjun ke dalam politik dan latar belakang dari keluarga yang memang sudah berpolitik....saya pengen mengabdikan kepada masyarakat, jadi saya berharap kerjasama dari masyarakat, saat saya mencalonkan diri ya saya minta bantuan mereka untuk mencoblos saya saat nanti saya duduk gantikan saya yang akan men-support program-program yang ada di masyarakat Jadi intinya simbiosis mutualisme” (Wawancara di Ruang Fraksi GOLKAR Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

Seperti yang sudah di katakan oleh Bu Arni, bahwa beliau datang dari keluarga yang memang sudah berbasis politik. Begitu pun dengan Ibu Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH caleg perempuan terpilih pendatang baru dari PDI Perjuangan, majunya beliau dalam pencalegan juga karena motivasi dari diri sendiri dan juga:

“Saya merasa akan berguna apabila saya bisa membantu masyarakat dalam proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur” (27 November 2019).

Beliau juga datang dari keluarga yang juga berpolitik. Jadi, ketika seorang tokoh sebelumnya sudah turun ke masyarakat akan lebih mudah untuk menghimpun massa. Artinya memiliki basis masa yang banyak menjadi faktor pendukung seorang caleg perempuan, dalam hal ini Ibu Nur Yuni sudah memiliki modal awal

massa dari pendukung keluarganya yang sebelumnya sudah terjun ke dalam politik.

Berbeda dengan Ibu Novi Sarhati caleg perempuan terpilih pendatang baru dari Partai Gerindra, wawancara dilakukan di Ruang Fraksi Gerindra Kabupaten Bantul, 31 November 2019, beliau termotivasi karena mendapatkan dorongan dan dukungan dari suami dan keluarga untuk maju menjadi calon legislatif dan juga ingin memperjuangkan hak-hak perempuan. dari hasil wawancara tersebut dapat diperkuat dengan pernyataannya yang dilansir dari berita pastvnews.com beliau mengatakan bahwa “ingin mengupayakan adanya peningkatan keterampilan bagi para wanita agar mampu berwira swasta dan menopang ekonomi keluarganya”. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Suratun caleg petahana perempuan terpilih dari PAN, 14 November 2019 “Ya karena motivasi dari diri sendiri, dukungan dari keluarga, dan teman-teman saya”. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua caleg perempuan tidak terpilih pendatang baru dari partai Golkar (Ibu Ekawati Hestningsih):

“Sebenarnya untuk memenuhi kuota, cuma kan kita sebagai perempuan harus berani juga tampil menjadi wakil, minat sendiri enggak Mbak, karena kita juga tau kalo mau nyaleg tidak cukup dari kita saja tetapi juga ada finansial, yang jelas itu” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 2 November 2019).

Caleg perempuan tidak terpilih lainnya yang termasuk pendatang baru dari PAN (Ibu Padmini):

“Pertama memenuhi kuota terlebih dulu untuk pengalaman kita, seperti apa, sejauh mana kemampuan kita kepada masyarakat, bagaimana masyarakat menilai kita menjadi keterwakilan perempuan” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 20 November 2019).

Ibu Padmini diangkat dari partai untuk maju ke dalam pemilu. Hal berbeda dengan Ibu Sri Wardani salah satu caleg tidak terpilih pendatang baru dari Partai Gerindra:

“Bagaimana saya bisa berkontribusi untuk kemajuan perempuan sendiri itu dalam hal ini kan kalau saya hanya menggunakan kendaraan Yayasan saya itu terbatas itu Tapi ketika saya sudah di institusi minimal saya di daerah tingkat 2 Bantul ya Saya mikir dari Banguntapan untuk Bantul dan Indonesia gitu seperti itu saya niatkan saya itu bukan status ingin memperjuangkan hak perempuan sekaligus aktualisasi diri, sekaligus juga didalamnya itu bagaimana lah kita menjadi orang yang lebih bermanfaat” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 4 November 2019).

Ibu Sri Lestari caleg perempuan tidak terpilih dan termasuk pendatang baru juga dari PDIP pada saat wawancara memang maju karena motivasi dari diri sendiri dan beliau beranggapan bahwa kalau memang bisa berguna untuk orang banyak kenapa tidak (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 25 November 2019). Ini juga karena mereka yang sudah lebih dulu bergerak di bidang kemanusiaan seperti Ibu Sri Wardani yang memiliki yayasan sosial dan Ibu Sri Lestari aktif pada LSM yang bergerak di bidang kesehatan.

Peningkatan yang terjadi juga karena adanya motivasi dari kader perempuan itu sendiri untuk maju dengan alasan selain untuk memenuhi keterwakilan perempuan, untuk pembangunan dan infrastruktur, ada yang sekedar mencoba untuk tahu bagaimana

pertarungan di dalamnya, ada satu alasan lainnya yaitu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan.

Motivasi kader juga dapat mempengaruhi keterpilihan seorang caleg perempuan dalam pemilu. Mendapatkan dukungan partai politik tentu tidak cukup, tentu diperlukan juga motivasi dari caleg perempuan itu sendiri. Karena menurut peneliti, motivasi yang datang dari kader perempuan itu sendiri akan lebih bekerja ketika mereka berkompetisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan partai politik dan motivasi kader menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keterpilihan perempuan.

3.2.2 Faktor Penghambat

a. Budaya Patriarki

Sampai saat ini budaya patriarki atau budaya yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin dari pada perempuan dalam segala aspek termasuk politik dan pemerintahan dan masih ada atau melekat sebagian dari masyarakat Indonesia. Budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghambat dalam keterpilihan perempuan. Salah satu penyebab yang membuat budaya patriarki masih melekat pada masyarakat adalah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa sebaiknya yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki, sehingga hal ini membatasi perempuan untuk maju menjadi pemimpin di pemerintahan (legislatif) dan politik.

Di dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber baik dari caleg perempuan terpilih maupun tidak terpilih yang mengemukakan bahwa budaya patriarki yang melekat di masyarakat saat ini sudah tergeser, seiring dengan perkembangan zaman keberadaan perempuan mulai dipertimbangkan atau mulai timbul kepekaan terhadap kesetaraan gender, apalagi di dalam partai politik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Ibu Arni Tyas Palupi, ST caleg petahana perempuan terpilih dari Partai Golkar, wawancara dilakukan di Ruang Fraksi Golkar Kabupaten Bantul, 1 November 2019 yaitu “Kalau yang saya rasakan saat ini, enggak. Kalau di partai sendiri alhamdulillah tidak ada diskriminasi”. Begitu juga dengan caleg perempuan tidak terpilih pendatang baru dari PAN Ibu Padmini, beliau mengatakan “budaya patriarki saat ini sudah mulai berkurang di masyarakat, ini kan juga karena sudah peka dengan kesetaraan gender” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 20 November 2019). Kalau menurut Sri Wardani caleg perempuan tidak terpilih pendatang baru dari Partai Gerindra:

“budaya patriarki menurut saya itu bukan menjadi satu hambatan seorang pemimpin seorang leader walaupun dengan Satu catatan harus ingat fitrahnya sebagai perempuan. Tidak serta merta tinggalkan anak suami gitu dengan kata lain harus bisa memprioritaskan” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 4 November 2019).

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase untuk caleg perempuan terpilih di parlemen. Pada pemilu 2014,

persentase caleg perempuan terpilih hanya mencapai 3 orang atau setara dengan 6,6%. Kemudian pada pemilu 2019, persentase untuk caleg perempuan meningkat sebanyak 2,3% dan menjadi 8,9% di parlemen.

Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa budaya patriarki menjadi penghambat terpilihnya caleg perempuan, seperti yang di katakan oleh caleg perempuan tidak terpilih Partai Golkar, Ibu Ekawati Hestningsih (pendatang baru) saat ditanyakan terkait budaya patriarki “salah satunya seperti itu, pokoknya pemimpin harus laki-laki mesti tidak mustahil, masyarakat imagenya kayak gitu, kalau wong wedok itu masih kurang” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 2 November 2019). Kalau menurut Ibu Sri Lestari (pendatang baru) caleg perempuan tidak terpilih dari PDI Perjuangan:

“memang benar mbak terkadang gini perempuan itu terkadang gimana ya, orang jawa bilang 'keserimpet sinjang' jadi cara melangkahnya kalau perempuan harus mengurus rumah tangga (peran ganda) jadi langkahnya kurang maksimal, itu yang kadang membuat perempuan dilema juga, disisi lain harus bisa memilah antara pekerjaan rumah dan harus bersosial”(Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 25 November 2019).

Artinya seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa budaya patriarki saat ini hanya melekat di beberapa masyarakat saja. Ini berarti budaya patriarki sudah mulai bergeser seiring dengan mulai peka atau paham terkait dengan kesetaraan gender.

Masyarakat yang sebelumnya berpikir bahwa kepemimpinan harus berada di pundak laki-laki mulai tergeser dengan pemikiran bahwa perempuan juga bisa memimpin, walaupun dengan peran ganda yang mereka miliki. Yang jelas apabila seorang perempuan sudah menjadi pemimpin atau anggota legislatif, harus bisa memprioritaskan tugasnya sebagai seorang ibu dan istri dengan tugasnya di dalam pemerintahan atau politik.

b. Proses Seleksi Dalam Partai Politik

Proses seleksi dalam partai politik juga dapat menjadi penghambat keterpilihan perempuan dalam pemilu. Proses seleksi partai politik yang biasanya dilakukan oleh pemimpin atau ketua partai politik yang di dominasi oleh laki-laki yang akhirnya membawa pengaruh pada struktur partai politik yang akan di dominasi oleh laki-laki dan perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam kepengurusan partai politik. Hal ini dikarenakan anggota terkhususnya perempuan akan sulit untuk berkembang sehingga menyulitkan perempuan untuk bersosialisasi terutama untuk di internal partai sendiri. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah anggota perempuan dari partai politik apabila maju dalam pencalegkan akan kesulitan untuk menggaet atau mendapatkan massa untuk memberikan suaranya kepada caleg perempuan.

Tetapi hal ini berbanding terbalik antara teori dengan temuan yang ada di lapangan. Hasil dari wawancara mengatakan bahwa dari partai politik sendiri, dalam proses seleksi partai politik teruntuk kepengurusan partai sudah mengikutsertakan perempuan. ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Bapak Joko Purnomo, beliau mengatakan:

“Jadi kan nanti masing-masing kepengurusan sesuai tingkatan sekarang ia karena sudah ada 30% keterwakilan perempuan mereka yang pertama kali kita berikan kesempatan untuk maju kemudian menjadi pengurus Partai” (Wawancara dilakukan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul, 8 November 2019).

Untuk proses seleksi partai politik terkait dengan pencalegan, model dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan dari keempat partai tersebut yaitu dengan mengutamakan kader internal terlebih dahulu. Ketua DPC Bantul Partai Golkar, mengatakan:

“Alhamdulillah mbak kalau sekarang itu kesadaran perempuan untuk maju terjun ke dunia politik itu sudah muncul atau dengan kata lain motivasi dari kader itu sendiri seperti itu. Karena mereka mewakili unsur perempuan juga toh Mbak. Karena mereka kebanyakan pengurus partai mbak, kalau pengurus kan artinya pengkaderan. Kalau partai golkar partai pengkaderan” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi Golkar Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

Tetapi yang menjadi pembeda adalah dari Partai PAN dan Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan yaitu model perekrutan yang sama juga dilakukan dengan mengutamakan caleg dari internal partai dan untuk memenuhi kuota 30% tadi, kemudian baru

akan melakukan perekrutan dari eksternal partai. Diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut, hasil wawancara terkait proses seleksi partai politik dengan SekJen PAN Pak Damba Aktivis:

“Pertama karena kita punya sayap organisasi partai itu ada Puan dulu namanya Sekar Surya, itu organisasi yang di mana disitu mewadahi kader-kader perempuan dan kemudian kita punya namanya Barisan Muda di situ ada laki-laki, perempuan juga ada. Nah sistem rekrutmen kita itu kan terbuka di internal” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi PAN Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

Beliau juga mencontohkan seperti ini apabila di satu dapil ada 7 kursi, dua kursi untuk perempuan, yang satu kalau kita diambilkan dari kader, pengurus atau teman-teman dari sayap partai, kalau ada dimasukkan, yang satu di kasih slot untuk tokoh di luar partai seperti PKK atau tokoh masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul Bapak Joko Purnomo, beliau mengatakan:

“Jadi gini kita memang pertama mengutamakan kader lama ya. Kemudian yang kedua memberikan kesempatan juga kepada yang non kader artinya dari luar yang memang dia bisa memberikan afiliasinya kepada PDIP Perjuangan jadi kita berikan kesempatan juga”.

Pada saat saya bertanya ke Sekjen PAN terkait dengan kader yang maju berarti memiliki pemahaman terhadap politik dan fakta menariknya adalah mereka (caleg perempuan) yang mengajukan diri tidak semata-mata mengerti dengan politik, pemahaman akan politik akan terjadi ketika mereka berproses di dalamnya. Selanjutnya, hasil wawancara Sekretaris DPC Gerindra

Bantul Pak Darwinto “Dilihat dari keanggotaan mereka sudah lama atau belum, kontribusi ke partai seperti apa” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi Gerindra Kabupaten Bantul, 1 November 2019). Maka dari itu, proses seleksi dalam partai politik bukanlah menjadi faktor penghambat keterpilihan untuk seorang caleg perempuan seperti yang ada di dalam teori, mengingat dari partai politik sendiri sudah ada partisipasi perempuan di dalamnya.

Secara teori proses seleksi dalam partai juga dapat mempengaruhi keterpilihan seorang caleg perempuan dalam pemilu. Kenapa, karena dalam proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik tentu akan mengeluarkan kader-kadernya atau anggotanya yang terbaik, dalam hal ini internal partai untuk maju ke dalam pemilu terutama caleg perempuannya. Sehingga ini membuka peluang dan kesempatan kepada caleg perempuan untuk bisa mensosialisasikan visi misinya dan bisa berkontribusi lebih di masyarakat. Tetapi temuan di lapangan berbeda, seperti yang dikatakan oleh Ibu Arni Tyas Palupi caleg petahana perempuan terpilih dari Golkar, beliau mengatakan “sebenarnya bukan kepada prosesnya mbak, tapi person yang dipilih partai itu” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi Golkar Kabupaten Bantul, 1 November 2019). Kemudian disampaikan oleh Ibu Ekawati caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari Partai Golkar “tidak mempengaruhi, tetapi balik lagi bagaimana caleg perempuan yang

bertarung” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 2 November 2019).

Artinya proses seleksi dalam partai politik tidak ada hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu, hal ini dikarenakan keterpilihan perempuan dalam pemilu balik lagi ke caleg perempuan yang bertarung di dalam pemilu, apa strategi yang digunakan untuk mendapatkan massa, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat saat melakukan sosialisasi dan kampanye di masyarakat.

c. Faktor Keluarga

Seorang caleg perempuan tentu tidak akan cukup apabila hanya mendapat dukungan dari partai politik. Tentu juga diperlukan dukungan dari keluarga. Faktor keluarga ini menjadi penghambat seseorang terpilih karena peran ganda yang dimiliki seorang perempuan. Tetapi temuan di lapangan berbeda. Faktor keluarga malah menjadi faktor utama seorang caleg perempuan untuk terpilih. Berdasarkan hasil wawancara malah faktor keluarga menjadi faktor utama keterpilihan seorang caleg perempuan. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Arni Tyas Palupi caleg petahana perempuan terpilih Golkar:

“Berawal dari bentukan keluarga yang memang mengikuti suatu partai politik khususnya Partai Golkar. Beliau (bapak saya) berpikiran alangkah senangnya jika ada di keluarga, salah satu

putra dan putrinya itu ada yang mau meneruskan beliau, dari 4 anak beliau saya kan satu-satunya perempuan, yang satu jadi terbentur PNS yang berdua tidak berminat akhirnya tinggal saya yang ditawari mau gak gabung di partai politik akhirnya saya menyatakan iya” (Wawancara dilakukan di Ruang Fraksi Golkar Kabupaten Bantul, 1 November 2019).

Ditambah lagi beliau selalu hadir di masyarakat, silaturahmi dan selalu mengedepankan transparansi (apa-adanya) sehingga memudahkannya dalam melakukan sosialisasi. Artinya ketika ada salah satu anggota dari keluarga sudah berpolitik di awal, akan memudahkan seseorang untuk memperoleh basis masa yang banyak dan mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat juga. Jadi tidak heran, apabila beliau terpilih lagi untuk ketiga kalinya sebagai caleg perempuan terpilih satu-satunya dari Partai Golkar. Caleg perempuan terpilih lainnya, Ibu Nur Yuni Astuti caleg pendatang baru dari PDIP, beliau mengatakan:

“Dukungan dari keluarga sangat besar sekali Mbak, hampir semua memberikan semangat dan motivasi. Karena memang saya besar di keluarga yang melayani masyarakat jadi mereka selalu memberikan semangat” (27 November 2019).

Begitu juga dengan Ibu Suratun caleg petahana perempuan terpilih dari PAN, beliau mendapatkan dukungan yang besar dari keluarga terutama suami dan anaknya dengan memberikan motivasi dan semangat, bahkan teman beliau juga mendukung beliau untuk maju ke parlemen. Yang membuat beliau terpilih kembali dan sudah 4 periode menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bantul, tidak lepas dari kegiatannya yang mengabdikan

masyarakat dan juga eksistensi beliau di dalam Partai PAN sendiri, mulai dari bawah tingkat Kecamatan yaitu Sekar Surya Kecamatan Pelret sampai akhirnya naik ke Bantul menjadi Wakil Ketua DPD PAN Bantul.

Novi Sarhati caleg perempuan pendatang baru terpilih dari Gerindra mendapatkan dukungan dari keluarga terutama suami yang selalu memberikan motivasi dan support yang besar kepada beliau. Beliau sendiri sebelumnya sempat lurah tidak jadi dan memiliki suami seorang polisi yang otomatis beliau masuk ke dalam organisasi Bhayangkari. Dari sinilah beliau sudah memiliki modal awal yaitu basis massa yang banyak, sebagai pemilih beliau pada saat pemilu. Caleg perempuan lainnya jua mengatakan hal yang sama seperti Sri Lestari caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari PDIP:

“Kemarin saya juga bilang kepada anak saya bahwasannya gini, Ibu mau maju menjadi seorang anggota dewan gimana Apakah kalian siap? baik bapak maupun anak saya kebetulan anak saya kan satu Mbak dengan Resiko yang ada sekarang harus tidak selalu di rumah harus memperjuangkan ini dan itu ya kan 'gakpapa ibu kalau ibu mampu kenapa tidak' seperti itu. Bapak kemarin juga ‘Monggo’ terserah aja yang penting kamu bisa membawa diri bisa betul-betul memperjuangkan suara rakyat karena kamu juga dari nol ‘Monggo’ seperti itu” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 25 November 2019).

“Suami sangat mendukung Mbak, jadi kalau di keluarga saya mungkin melihat saya punya kemampuan untuk itu, adik juga mendukung” (Wawancara dengan Ibu Sri Wardani caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari PDIP, lokasi wawancara di kediaman beliau, 4 November 2019).

“Keluarga mendukung terutama suami saya. Latar belakang berpolitik di Golkar, bapak dan ibu juga aktivis golkar, sebetulnya dari dulu saya aktivis golkar cuma kan sempat vakum karena hamil, kemudian dirangkul lagi oleh Pak Paidi” (Wawancara dengan Ibu Ekawati Hestningsih caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari Partai Golkar, wawancara dilakukan di kediaman beliau, 2 November 2019).

“Keluarga malah menjadi faktor pendukung untuk saya Mbak, yang penting saya tetap di jalan, tidak menyimpang” (wawancara dengan Ibu Padmini caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari Partai PAN, wawancara dilakukan di kediaman beliau, 20 November 2019)

Artinya faktor keluarga yang secara teori menjadi penghambat bagi caleg perempuan dalam keterpilihannya sebagai anggota parlemen akibat peran ganda yang dimiliki terpatahkan dengan hasil temuan di lapangan. Bahwa faktor keluarga menjadi faktor pendukung keterpilihan perempuan bahkan menjadi faktor utama. Apalagi ketika caleg perempuan datang dari keluarga yang latar belakangnya berpolitik, seperti yang sudah dibilang sebelumnya itu menjadi modal awal seorang perempuan untuk maju ke dalam pemilu dalam mendapatkan massa yang banyak, sehingga ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung lainnya yang mempengaruhi keterpilihan perempuan. Tetapi bukan berarti karena caleg perempuan yang mempunyai keluarga yang terjun lebih dulu ke dalam politik menjadi terciptanya politik dinasti atau kekuasaan di dalam politik dan pemerintahan yang kuasai oleh orang-orang yang masih mempunyai ikatan keluarga seperti itu, caleg perempuan terpilih dan tidak terpilih merupakan kader terpilih atau internal partai yang sudah berkontribusi lebih ke dalam

partai dan potensi atau pemahaman akan politik dari caleg perempuan itu sendiri dengan kata lain caleg perempuan yang maju adalah SDM yang berkualitas.

d. Sistem Multi -Partai

Sistem kepartaian yang ada di Indonesia adalah sistem multi-partai. Sistem multi-partai menjadi dapat menjadi penghambat. Hal ini dikarenakan banyaknya partai politik yang bersaing di untuk mendapatkan kursi di parlemen, yang juga akan mempengaruhi keterpilihan perempuan di parlemen. Kabupaten Bantul diikuti oleh 16 partai politik peserta pemilu dengan total keseluruhan caleg perempuan sebanyak 204 orang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Padmini caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari PAN yakni: “justru dengan sistem multi partai ini perwakilan dari masing-masing partai justru saling mensupport bukan menjadikan musuh begitu, kita saling support kalau bisa kita maju” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 20 November 2019). Ini diperkuat lagi dengan pendapat dari Ibu Sri Lestari caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari PDI Perjuangan yaitu “sistem multi partai itu tidak menghambat juga sih Mbak, tergantung bagaimana kita sebagai perempuan itu kemarin kalau kita betul-betul ingin dan ingin

memperjuangkan ya berjuanglah begitu” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 25 November 2019).

Hal yang sama juga di katakan oleh Ibu Ekawati Hestningsih caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari Partai Golkar yakni:

“malah sudah bagus juga Mbak 4 sudah yang jadi, tapi belum 30% belum ya, kuotanya masih belum. Tapi ya alhamdulillah sudah ada perwakilan kita jadi perempuan itu 4 sudah bagus harusnya paling enggak 10 toh” (Wawancara dilakukan oleh kediaman beliau, 2 November 2019).

Artinya hasil wawancara dengan caleg tidak terpilih mengatakan bahwa sistem multi partai tidak seharusnya menjadi penghambat perempuan untuk terpilih, karena dari sinilah perempuan saling mendukung satu sama lain, tidak menganggap caleg perempuan lainnya sebagai pesaing. Belum lagi apabila ada caleg perempuan yang terpilih tentu akan dapat mewakili suara rakyat yang ada di sekitarnya terutama mewakili suara perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Berbeda dengan Ibu Sri Wardani caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih dari Partai Gerindra, beliau berpendapat bahwa:

“Sistem multi partai tentu menjadi pengaruh, kalau di Gerindra kemarin semua keterwakilan perempuan menuhi untuk pencalegan. Sangat kompetitif, tapi yang bisa dilihat adalah partai-partai besar. Saat ini juga PDI mendominasi sudah mengakar di masyarakat, kemudian ada juga Partai PAN,

Golkar, PKS, Nasdem dan Demokrat” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 4 November 2019).

Artinya partai-partai yang namanya sudah besar atau dikenal oleh masyarakat luas dapat mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan. Karena, pertama eksistensi yang dimiliki oleh partai politik tersebut kepada masyarakat dan kedua tidak lepas dari seorang pemimpin dari partai politik yang namanya sangat-sangat di kenal oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dengan sudah dikenalnya partai tersebut, tentu juga akan lebih memudahkan masyarakat untuk memilih wakil rakyatnya, mengingat pada pemilu tahun 2019 ini masyarakat mendapatkan 5 surat untuk memilih wakil rakyatnya secara serentak pada tanggal 17 April 2019 antara lain Surat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Surat Pemilihan DPR RI, Surat Pemilihan DPD RI, Surat Pemilihan DPRD Provinsi, dan Surat Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menanyakan kepada narasumber terkait faktor yang menghambat keterpilihan caleg perempuan antara lain *incumbent* yang mencalonkan diri kembali dalam pemilu. Ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama ibu Sri Wardani caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih Partai Gerindra beliau mengatakan:

“*Incumbent* yang maju. Kenapa? karena *incumbent* itu bagaimana pun juga sudah berkiprah di masyarakat, sudah

menebar duluan gitu, oromatis itu menjadi suatu penghambat ketika kita mau merebut suara rakyat dan amplop yang bertebaran di serangan fajar”.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Sri Lestari caleg perempuan pendatang baru tidak terpilih PDIP yaitu “karena adanya *incumbent* and yang sudah maju sehingga memiliki modal awal untuk mendapatkan masa” (Wawancara dilakukan di kediaman beliau, 25 November 2019). Begitu juga dengan Ibu Ekawati Hestningsih caleg perempuan pendatang tidak terpilih dari Partai Golkar “kalau yang sudah terpilih memang semangatnya bagus dan enak toh mbak, masanya sudah banyak....*money politic* masih tetap berjalan mbak’e”. Berikut adalah tabel kategorisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul:

Tabel 3. 7

Kategorisasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Bantul

No.	Faktor-faktor	PDIP	GOLKAR	PAN	GERINDRA
1	Dukungan Partai Politik	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
2	Motivasi Kader	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
3	Faktor Keluarga	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
4	Rekam jejak	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
5	Basis Masa yang Banyak	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung
6	Sistem Multi-partai	pendukung	pendukung	pendukung	pendukung

7	<i>Incumbent</i> yang mencalonkan kembali	Penghambat	Penghambat	Penghambat	Penghambat
8	<i>Money</i> <i>Politic</i>	Penghambat	Penghambat	Penghambat	Penghambat

Sumber: Diolah Dari Hasil Wawancara

Berdasarkan teori yang di pakai dalam penelitian ini, yang termasuk ke di dalam faktor pendukung adalah dukungan partai politik dan motivasi kader. Tetapi terdapat temuan baru di lapangan terkait dengan faktor pendukung setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu rekam jejak dan basis masa yang banyak. Selanjutnya yang termasuk ke dalam faktor penghambat secara teoritik adalah budaya patriarki, proses seleksi dalam partai politik, faktor keluarga dan sistem multi-partai. Faktor keluarga yang sebelumnya secara teori termasuk penghambat justru temuan di lapangan setelah wawancara dengan narasumber malah menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu. Termasuk juga sistem multi-partai, faktor ini malah malah menjadi faktor pendukung bagi caleg perempuan karena di saat seperti pemilu inilah seluruh caleg perempuan saling memberikan semangat dan support satu sama lain dalam pemilu, walaupun di satu sisi sebagai kompetitor atau pesaing tetapi di satu sisi juga sesama kaum perempuan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ditemukan fakta bahwa budaya patriarki, proses seleksi dalam partai politik tidak menjadi faktor penghambat. Pertama, budaya patriarki saat ini sudah mulai tergeser dengan mulai timbul kesadaran terkait kesetaraan gender. Kedua, proses dalam

partai politik, tidak mempengaruhi bahkan tidak ada hubungannya dengan keterpilihan caleg perempuan karena itu akan balik lagi bagaimana caleg perempuan tersebut bertarung di dalam pemilu. Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan temuan baru di lapangan terkait dengan faktor penghambat yang mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan dalam pemilu antara lain *incumbent* yang mencalonkan dirinya kembali dan *money politic*.

Setelah melakukan kategorisasi dapat kita lihat bahwa ada enam faktor pendukung yang mempengaruhi keterpilihan perempuan yaitu dukungan partai politik, motivasi kader, faktor keluarga, rekam jejak, basis masa yang banyak dan sistem multi-partai. Kita bisa melihat faktor mana yang paling mendominasi dari keempat partai politik tersebut berikut analisisnya: Pertama, ada Partai Golkar dan PDIP faktor yang mendominasi adalah faktor keluarga dan rekam jejak. Seperti yang disampaikan oleh caleg petahana perempuan terpilih Partai Golkar Arni Tyas Palupi, ST beliau mengatakan bahwa sebelumnya ayah beliau sangat dikenal di masyarakat, sempat menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Bantul selama 5 periode, ditambah lagi dengan rekam jejak beliau di dalam partai politik dan menjalin hubungan baik beliau dengan masyarakat.

Begitu pun caleg perempuan pendatang baru dari PDIP, Nur Yuni Astuti, S. Sos., SH yang mengatakan bahwa beliau datang dari keluarga yang berlatar belakang politik yaitu ayah dan pakdenya yang lebih dulu berpolitik dan rekam jejak dari beliau sendiri dalam partai yaitu sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPC PDIP Kabupaten Bantul. Caleg perempuan tidak

terpilih Ibu Sri Lestari mengatakan hal yang sama Artinya ketika ada keluarga yang lebih dulu terjun di dalam politik dan juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat luas secara tidak langsung memudahkan beliau untuk bersosialisasi dan melakukan silaturahmi di masyarakat, sehingga juga memudahkan beliau mendapatkan suara pada saat bertarung di dalam pemilu.

Ketiga Partai PAN sendiri faktor yang mendominasi adalah faktor keluarga. Hal ini dikarenakan ketika dukungan dan motivasi yang diberikan oleh orang terdekat terutama anak dan suami dapat membawa pengaruh yang besar dan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keterpilihan perempuan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Ibu Suratun, SH, caleg petahana perempuan terpilih dari Partai PAN yang mengatakan bahwa keterpilihan beliau tidak lepas dari dukungan keluarga dan semua elemen yang ikut berpartisipasi. Terakhir dari Partai Gerindra faktor pendukung yang mendominasi adalah untuk faktor keluarga. Faktor keluarga di sini yang dimaksud adalah dukungan keluarga dari anak dan suami yang mendukung caleg untuk maju sehingga secara tidak langsung menjadi itu sebagai semangat dan motivasi lebih agar dapat bersaing dan berkompetisi di dalam pemilu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Novi Sarhati caleg perempuan pendatang baru terpilih yang mengatakan bahwa suaminya adalah yang lebih dulu mensupport dia agar maju ke dalam pemilu.

Sedangkan untuk faktor yang penghambat yang mendominasi bagi semua caleg perempuan tidak terpilih dari Partai Gerindra, Golkar, PDIP dan PAN adalah *money politic* dan *incumbent* yang mencalonkan kembali. Hal ini dikarenakan pertama *money politic* sudah menjadi suatu budaya yang sulit

dihilangkan, ini tidak lepas dari lemahnya regulasi tentang hukuman pidana bagi pemberi dengan kata lain regulasi ini tidak berjalan dengan baik. Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Sri Lestari caleg perempuan pendatang baru yang mengatakan bahwa money politic sudah menjamur saat masuk masa pemilu. Kedua, *incumbent* yang mencalonkan kembali menjadi penghambat belum lagi banyak caleg perempuan pendatang baru dalam pemilu 2019 di Kabupaten Bantul, ini dikarenakan mereka sudah lebih dulu berkiprah di masyarakat yang otomatis basis masa/pendukungnya lebih banyak yang mana itu sudah menjadi modal awal caleg petahana atau *incumbent*. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ekawati Hestningsih caleg perempuan pendatang baru untuk mendapatkan masa